

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, begitu juga pengetahuan yang masih relatif masih sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Desa sebagai unit pemerintah daerah paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat, yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang di butuhkan oleh masyarakat, untuk lebih profesional didalam memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Desa sebagai aparat pemerintah selaku abdi Negara dan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerja sama Kepala Desa dan perangkatnya untuk

melaksanakan urusan dekosentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagai mana sesuai dengan rencana pembangunan desa.

Dengan demikian, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah desa terdapat unsur-unsur yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi kapasitas dan efektifitas kerja organisasi pemerintah desa. Di dalam struktur organisasi pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan wilayah yang terendah sebagai ujung tombak pelaksanaan asas otonomi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah menetapkan bahwa desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adad istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten¹.

Kemajuan Bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab dari segala pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin bisa di capai tanpa disertai usaha-usaha pembangunan disegala sektor dan disegala bidang kehidupan masyarakat.

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Laju dari pertumbuhan nasional Indonesia menghendaki adanya keseimbangan pembangunan antara sektor kota dan sektor pedesaan, menurut Muljanto Tjokrowinoto sebagai berikut:

“ Tempo dari pembangunan nasional Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara sektor kota dan sektor pedesaan. Pembangunan lima tahun telah menggariskan bahwa sektor pedesaan merupakan kebulatan yang tidak terpisahkan dengan sektor perkotaan dalam rangka pembangunan regional dengan kata lain pembangunan pedesaan merupakan determinan struktural dari pembangunan nasional².

Dari pendapat Muljanto Tjokrowinoto diatas, maka jelaslah pembangunan disektor kota dan sektor pedesaan merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat terpisahkan. Kalau kita amati secara mendalam, maka pembangunan di Indonesia sampai dewasa ini masih sedikit dinikmati oleh masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Sektor perkotaan dengan sektor industri yang maju begitu pesat, pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan yang semuanya membutuhkan lahan sehingga area pertanian semakin berkurang. Sedangkan masyarakat desa belum mampu mengejar kemajuan disektor kota.

Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa dibutuhkan kepemimpinan yang dipercaya oleh masyarakat desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau

² Muljanto Tjokrowinoto, Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Balai No. 2, 1977 BPA UGM YK.

gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

“Seorang Kepala Desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan³. Pembangunan pedesaan mencakup proses modernisasi untuk mengubah sikap dan pola pikir yang justru malah mendorong pembangunan.

Karena itu, sehubungan dengan adanya usaha-usaha kearah modernisasi dan peningkatan dari keadaan sosial ekonomi yang dilakukan, baik pemerintah maupun dari usaha masyarakat yang bersangkutan, janganlah hanya merupakan bentuk lahiriah masyarakat desa saja, akan tetapi hendaknya mampu merubah kepribadian warga desa terhadap sikap mental.

Dalam proses pembangunan di samping mengejar pencapaian dalam bentuk lahiriah, juga diutamakan mengubah sikap mental, pola pikir masyarakat desa agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan ide-ide dan gagasan dari pembangunan tidak disertai peran serta masyarakat, maka justru pembangunan tersebut akan menciptakan bentuk

³ Diantara Tjoksonidjo, *Beberapa Administrasi Pembangunan LP2ES, Jakarta 1976*

ketergantungan baru. Semula masyarakat tergantung pada anggapan-anggapan dan cara-cara hidup yang masih tradisional, kemudian dengan penerapan berbagai program dan bantuan pembangunan dari anjuran pemerintah apabila tidak diikuti peran aktif dari masyarakat, maka masyarakat akan menjadi tergantung pada pemerintah. Keadaan demikian ini sulit diharapkan timbulnya swadaya dari masyarakat itu sendiri.

Barang kali pemerintah telah mengetahui keadaan masyarakat seperti tersebut diatas, bahwa masyarakat desa banyak yang kurang pendidikannya ataupun kurang pengetahuannya, sehingga pemerintah baik dengan instruksi-intruksi maupun dengan berbagai kebijakan untuk mendirikan gedung-gedung sekolah dan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa. Pentingnya kepemimpinan yang baik bagi masyarakat desapun telah diketahui oleh pemerintah, sehingga pemerintah membina, membimbing dan memberi penataran-penataran kepada pamong-pamong desa dan kepada pengurus-pengurus organisasi desa yang lainnya dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa, dan sekaligus dapat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki kepemimpinan dipedesaan. Semua tindakan pemerintah tersebut. Tidak lain dalam rangka agar pembangunan masyarakat desa berhasil

Desa Ujung Tanjung merupakan desa yang paling maju jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Tanah Putih, begitu juga dengan masyarakatnya yang sudah berkualitas, ini dapat dilihat dari keberhasilan-keberhasilan dari desa Ujung Tanjung dalam kemajuan yang ada di desa Ujung Tanjung pada berbagai sektor yaitu :

1. Sektor Pendidikan yang sarana dan prasarannya telah mencukupi, mulai dari Taman Kanak-Kanak, sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

2. Sektor Ekonomi yaitu lengkapnya sarana perekonomian di desa Ujung Tanjung seperti pengadaan sarana industri, sarana perhubungan seperti jalan-jalan dan juga jembatan.

3. Kepercayaan yang telah diberikan oleh para investor, seperti PT. CALTEX dan PT. TRIPA ABADI yang telah menanamkan modalnya di desa Ujung Tanjung.

4. Kelengkapan sarana dan prasarana umum, seperti Stadion olah raga, Aula, dan sarana peribadatan.

Karena kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Ujung Tanjung, untuk mengetahui sejauh mana peran kepemimpinan Kepala Desa Ujung Tanjung dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat di desa Ujung Tanjung.

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan batasan suatu pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Menurut Poerwadarminta yang dimaksud masalah adalah “sesuatu hal yang harus dibicarakan”⁴. Dari pendapat itu maka dapat disimpulkan karena keadaan atau kejadian itu jika di cari pemecahannya, akan menghambat pencapaian tujuan. Bertitik tolak pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005?*
- b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dialami Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa?*

⁴ Poerwadarminta, WJS, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Suntingan Pusat Pembinaan dan

C. TUJUAN PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian maka seyogyanya harus mempunyai beberapa tujuan, yang bermaksud untuk memperoleh kebenaran yang obyektif atas dasar fakta yang diuji dengan mengadakan analisa terlebih dahulu.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menghadapi faktor penghambat tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang dapat menambah wawasan berfikir sebagai langkah untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam bangku perkuliahan dan dalam menganalisa kenyataan yang ada dan sedang terjadi didalam kehidupan masyarakat di desa

2. Bagi Kepala Desa

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk Kepala Desa Ujung Tanjung dalam peran, tugas, fungsi dan kewajibannya didalam pemerintahan desa atau didalam masyarakat desa.

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sedikit wawasan didalam khasanah ilmu pemerintahan khususnya didalam pemerintahan desa.

E. KERANGKA DASAR TEORI.

Sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “ Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa”, maka didalam judul tersebut terdapat empat variabel yaitu diantaranya :

1. Pembangunan kualitas.
2. Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Peran Kepemimpinan Kepala Desa.
4. Peran Kepala Desa
5. Pendidikan masyarakat.

6. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Kualitas Masyarakat

Didalam pembahasan kerangka dasar teori ini akan diuraikan semua mengenai beberapa variabel tersebut dan hubungan dari pada variabel-variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan masing-masing variabel tersebut secara satu persatu seperti diuraikan dibawah ini :

1. Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa

Sebelum membahas tentang pengertian pembangunan kualitas masyarakat desa, perlu terlebih dahulu dikemukakan arti pembangunan kualitas secara umum. Pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh:

Bintoro Tjokroamidjojo sebagai berikut :

Pembangunan adalah proses perubahan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kedalam keadaan yang lebih baik⁵.

Everett M Rogert berpendapat :

Pembangunan kualitas merupakan suatu bentuk perubahan sosial dimana ide-ide baru diterima kepada suatu masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta penghidupannya melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih sempurna.⁶

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka konsep pembangunan kualitas dapat diartikan sebagai berikut:

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, op.cit.

⁶ Everett M Rogert, *Modernization Among Peoples: the Impact of communications*, Binchast and

Pembangunan Kualitas adalah suatu bentuk perubahan sosial, dimana ide-ide baru diterima kedalam komunitas suatu masyarakat. Perubahan ini direncanakan dan dilakukan secara kontiniu untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dari masa sebelumnya, melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang baik pula. Untuk mengarah pada pengertian pembangunan kualitas masyarakat desa, dan oleh karena penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat desa khususnya di Desa Ujung Tanjung maka alangkah baiknya perlu dikemukakan terlebih dahulu yang dimaksud dengan pengertian masyarakat dan apa pengertian tentang desa itu sendiri.

Menurut Koencoroningrat mengemukakan sebagai berikut :

“ Masyarakat adalah kesatuan hidup dari mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem tertentu”.⁷

Pengertian desa mempunyai arti yang luas dan bisa berlaku umum diseluruh Indonesia, dalam hal ini pengertian desa adalah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 dijabarkan sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada

⁷ Koencoroningrat, Masyarakat Indonesia Masa Kini, Yayasan Badan Penelitian Falsafah Ekonomi

dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁸.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa : Masyarakat desa adalah kesatuan hidup dari orang-orang yang terikat oleh suatu sistem tertentu termasuk hukum. Mereka tinggal disuatu wilayah, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten.

Mengenai pengertian pembangunan kualitas masyarakat desa, menurut Muljarto Tjokrowinoto mengemukakan sebagai berikut:

“ Pembangunan kualitas masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat tersebut dalam arti material maupun spiritual”⁹.

Pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa menghendaki suatu tindakan dari seluruh warga desa secara bersama-sama maupun kolektif, dalam rangka meningkatkan tingkat hidup masyarakat desa tersebut baik berupa material maupun spiritual.

⁸ Undang-Undang No. 32, op, cit.

⁹ Muljarto Tjokrowinoto, op, cit.

Pembangunan kualitas masyarakat desa ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan membangkitkan dan memupuk kegiatan dan kesanggupan sendiri untuk mengusahakan sendiri.

Pendapat Sudigdo tentang pembangunan kualitas masyarakat desa tersebut, dapat dilihat adanya unsur dari luar yaitu untuk membangkitkan dan memupuk kegiatan masyarakat desa, yang akhirnya diharapkan masyarakat mampu mengusahakan sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Dari pendapat-pendapat diatas, maka konsep-konsep pembangunan kualitas masyarakat desa dapat dirumuskan sebagai berikut. Pembangunan kualitas masyarakat desa adalah suatu bentuk perubahan sosial masyarakat desa, dimana ide-ide baru dapat diterima secara berencana kedalam masyarakat desa untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, melalui metode produksi yang modern dan organisasi yang lebih sempurna.

Dalam proses pembangunan kualitas tersebut berbagai macam ide baru diperkenalkan kepada masyarakat, untuk meningkatkan potensi masyarakat sebagai sumberdaya manusia, menurut Noeng Muhadjir sebagai berikut :

¹⁰ Sudigdo, op. cit., hal. 10. "Kualitas Masyarakat Desa Ditafsirkan Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Jalan Membangkitkan dan Memupuk Kegiatan dan Kesanggupan Sendiri Untuk Mengusahakan Sendiri."

“Sumberdaya manusia adalah salah satu dasar utama untuk pembangunan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.”¹¹

Dalam uraian dan pendapat diatas, sumber daya manusia sebagai landasan berfikir studi ini, maka pokok konsep pembangunan disini menekankan pada perubahan proses mental, berupa penggantian atau modifikasi, wawasan pada masyarakat desa tentang ide-ide dan metode cara pemecahan yang benar, baik dan efisien. Dengan demikian, arah tujuan pembangunan yang dimaksud adalah peningkatan mutu warga masyarakat desa, dengan mengembangkan inisiatif dan kreatifitas, agar dapat menggunakan cara kerja yang lebih modern dan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka mencapai tingkat hidup masyarakat desa sesuai dengan cita-cita.

Menurut TB Simatupang, menyatakan bahwa : “ Sikap, cita-cita, nilai-nilai dan motifasi yang hidup dikalangan rakyat adalah tenaga pendorong dan alat pengukur dalam pembangunan”¹²

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai variabel pembangunan kualitas masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- a. Sikap inovatif dalam menerima ide-ide baru
- b. Motifasi untuk berkarya

¹¹ Noeng Muhadjir, Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat, Rake Press, Yogyakarta, 1983.

¹² TB Simatupang, Membangun Manusia Pembangunan, Laporan Konferensi Studi Untuk Pembangunan Di Cipayung, Soedepaxsi, Jakarta, 1970.

c. Aspirasi (cita-cita)

Adapun faktor kesadaran politik tidak digunakan sebagai alat ukur untuk variabel tersebut, dengan pertimbangan bahwa kesadaran politik masyarakat desa tidak langsung mempengaruhi tingkat hidup masyarakat desa. Pertimbangan kedua, bahwa data mengenai politik cukup sulit diperoleh, karena mayoritas masyarakat desa masih peka terhadap masalah politik. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing sub variabel akan diuraikan seperti dibawah ini :

a. Sikap inovatif dalam menerima ide-ide baru

Nasikun menjelaskan: “Inovatif didalam modernisasi akan merupakan rangkaian tindakan aktual untuk menggunakan atau melaksanakan ide-ide dan teknologi modern dalam lapangan pertanian, kesehatan, kehidupan keluarga dan lain sebagainya”¹³

Kesanggupan masyarakat dalam menerima dan menyerap inovasi dapat dipandang sebagai indikator yang cukup baik dalam mengukur pembangunan. Hal ini dapat dipahami, karena sikap inovasi lebih menunjukkan realita tingkat masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat terhadap ide-ide baru, teknologi modern, maka masyarakat lebih bisa mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, sehingga tercapai produktifitas yang tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Nasikun, *Modernisasi Versus Tradisionalisme*, Badan Litbang, Fak. Sosial UGM, Yogyakarta

b. Motifasi untuk berkarya

Roges memberikan pengertian inovasi berkarya sebagai berikut: “Motifasi berkarya merupakan nilai sosial yang menitikberatkan pada sesuatu keinginan yang lebih baik supaya individu dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan keinginan pribadinya”.¹⁴

Demikian maka motivasi berkarya adalah keinginan atau kebutuhan untuk mengerjakan sesuatu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih tinggi dan mencapai kepuasan pribadi.

Kemudian pendapat *Mc. Clelland* yang dikutip oleh *Albert Widjaja*, menegaskan sebagai berikut:

Motif berkarya biasanya disertai dengan semangat yang tinggi untuk mandiri, disiplin dan berusaha untuk mahir dalam tiap bidang yang ia lakukan. Motif berkarya yang demikian ini biasanya sangat tanggap terhadap insentif dan sikap seperti ini sangat baik untuk pembangunan.¹⁵

Dengan demikian motivasi berkarya dapat dikatakan sebagai apa yang mendorong manusia itu berkarya atau merupakan tenaga pendorong bagi manusia untuk berkarya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu motivasi berkarya yang tinggi dapat menunjukkan suatu keberhasilan pembangunan masyarakat desa.

¹⁴ Everett M Rogert.,op,cit

¹⁵ Albert Widjaja, *Dasar-Dasar Politik dan Pembangunan Ekonomi I DES*, Jakarta 1982

c. Aspirasi (Cita-cita)

Menurut *Noeng Muhadjir*: “Aspirasi adalah dinamika untuk mencapai sesuatu, dengan cara kerja keras atau kerja baik “. Selanjutnya *Noeng Muhadjir* menjelaskan: “Seseorang yang mendisiplinkan diri untuk mencapai sesuatu, seperti mendapat penghasilan lebih baik, untung lebih besar atau mengharapkan anaknya sukses dalam belajar, hal itu menunjukkan adanya aspirasi yang tinggi”.¹⁶

Dengan demikian aspirasi dapat diartikan sebagai cita-cita untuk mencapai sesuatu. Dengan aspirasi yang tinggi dalam masyarakat, maka masyarakat akan lebih berusaha, untuk merubah keadaan yang statis menjadi lebih kreatif. Sikap yang demikian ini termasuk salah satu ciri masyarakat modern.

2. Pembangunan Masyarakat Desa

Di Indonesia kata *pembangunan* sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud

¹⁶ *Noeng Muhadjir, op,cit.*

ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.

Rostow juga berbicara mengenai perlu akan adanya kelompok wiraswastawan yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaharuan, meskipun tindakan tersebut ada resikonya.

Teori pembangunan dari W.W. Rostow dan Dr. Arief Budiman, diatas sesuai dengan Aplikasi pembangunan yang terdapat di desa Ujung Tanjung, karena pembangunan di desa Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil karena peran materi dan juga manusia yang memiliki inisiatif memang sangatlah penting, dan di desa Ujung Tanjung , peran Kepala Desa sebagai seseorang yang disamping memiliki inisiatif sebagai manusia pembangun dan juga sekaligus seorang yang menjadi wiraswastawan yang berani melakukan tindakan pembaharuan yang menurut Rostow sangatlah beresiko.

3. Peran Kepemimpinan Kepala Desa.

Apabila sekelompok orang memutuskan untuk mengorganisasi segala kegiatan guna memperoleh apa yang menjadi perhatiannya serta guna memperoleh jalan yang memungkinkan untuk menguasai sumber daya alam dan sosial, maka yang diperlukan mereka adalah “kepemimpinan” (Leadership).

Untuk memperoleh kesempatan kepemimpinan, perlu mengambil

George R. Terry yang dikutip oleh Mifta Thoha, sebagai berikut :

“Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi”.²⁰

Menurut *Afan Gaffar* sebagai berikut:

“Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk memobilisir sumberdaya manusia didalam rangka mencapai atau memperoleh tujuan tertentu”.²¹

Sedangkan, *Sondand P. Siagian* mengatakan:

Ditinjau dari segi kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar rela, mampu dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis.²²

Berdasarkan pendapat dan definisi-definisi diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain tersebut melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian maka konsep kepemimpinan Kepala Desa dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

²⁰ Mifta Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, CV Rajawali, Jakarta, 1983

²¹ Afan Gaffar, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Fak.SOSPOL, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 1982.

²² Sondand P. Siagian, *Manajemen Organisasi*, Gramedia, Jakarta, 1976

Kepemimpinan Kepala Desa adalah kemampuan Kepala Desa untuk mempengaruhi pikiran dan sikap dari warga masyarakat desa, agar masyarakat desa melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan bersama (Kepala Desa dan masyarakat desa). Dalam artian yang menjadi perintah, kehendak Kepala Desa dapat diterima, dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung.

Konsep kepemimpinan Kepala Desa diatas, bila kita kupas dapat kita temukan tiga unsur didalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur orang-orang

Yaitu disatu pihak Kepala Desa atau orang yang mempengaruhi peran (pemimpin) dan dipihak lain adalah orang-orang yang mempengaruhi (warga Masyarakat desa). Jadi kepemimpinan disini mengandung suatu hubungan peran antara Kepala Desa (sebagai pemimpin) dan warga masyarakat.

b. Unsur sarana

Ialah semacam cara yang membuat Kepala Desa mampu mewujudkan kemampuannya berperan untuk mempengaruhi orang lain (warga masyarakat desa) atau dapat dikatakan sebagai sesuatu, untuk mengoperasionalkan kepemimpinan tersebut.

c. Unsur tujuan.

Sarana atau sesuatu yang hendak dicapai, dalam hal ini oleh Kepala Desa dan pengikutnya (Masyarakat desa). Seperti disebutkan diatas bahwa kepemimpinan mengandung unsur hubungan peran atau dua belah pihak yaitu pemimpin dan pengikutnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut oleh pemimpin.

Sehubungan dengan hal itu, Afan Gaffar menegaskan:

Kehadiran orang yang mempunyai kelebihan kekuasaan dan pengaruh dibandingkan dengan orang lain, menunjukkan adanya suatu perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin, demikian juga antara orang-orang yang mempunyai asset yang lebih besar terhadap sumber daya atau barang-barang baik bersifat material maupun non material yang diperlukan guna membentuk, mendukung, merubah struktur dan kegiatan-kegiatan organisasi juga orang-orang yang tidak memiliki sama sekali sumber daya tersebut, akan membedakan pula antara pemimpin dan bukan pemimpin.

Menurut Arifin Abdulrachman:

“Pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu”.²³

Menurut S. Bogardus berpendapat:

²³ A. G. Afan Gaffar, *Teori, Perkembangan dan Filosofi Kepemimpinan*

“Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai pengaruh khusus terhadap sejumlah orang.”²⁴

Dari para pendapat-pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pengertian pemimpin tersebut diatas dapat dimengerti bahwa setiap orang yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain dapat dikatakan sebagai pemimpin, tanpa harus mempersoalkan kedudukan, fungsi maupun peranan seseorang dalam usaha kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu atau tidak harus diikat terjadi dalam organisasi tertentu saja. Melainkan bisa terjadi dimana saja asalkan seseorang mampu mempengaruhi orang lain kearah tercapainya suatu tujuan bersama.

Namun demikian pemimpin masih dapat dibedakan menjadi dua jenis , yaitu pemimpin formal dan pemimpin non formal. Yang dimaksud pemimpin formal dan non formal menurut S Yuwano adalah sebagai berikut :

Yang termasuk *pemimpin formal* ialah seluruh pejabat yang menduduki jabatan kepala dalam suatu unit organisasi aparatur pemerintah.

Ciri-ciri pemimpin formal antara lain ialah :

²⁴ *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan dan Administrasi*, G. S. J. N., 1974

- Memiliki legalitas formal
- Memiliki dukungan formal untuk menjalankan keputusan
- Mempunyai status sebagai pemimpin pada masa pengangkatan berlaku.²⁵

Sedangkan *pemimpin non formal* adalah sebagai berikut:

Pemimpin non formal adalah seorang yang tidak menduduki jabatan tertentu dalam organisasi aparatur pemerintah tapi mampu mempengaruhi sejumlah orang untuk berbuat atau tidak berbuat mengenai sesuatu aspek kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu .

Ciri-ciri pemimpin non formal ialah :

- Tidak memiliki legalitas
- Masyarakat atau kelompok tertentu yang menunjuk
- Diakui statusnya selama diterima masyarakat atau kelompok tertentu.

Dari pendapat S Yuwono di atas, dapatlah diketahui bahwa Kepala Desa adalah termasuk pemimpin formal, karena Kepala Desa memenuhi ciri-ciri pemimpin formal seperti tersebut diatas, yaitu bahwa Kepala Desa memiliki legalitas formal karena diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang dipilih dan terpilih. Kepala Desa memiliki dukungan formal untuk menjalankan keputusan, yaitu

²⁵ S. Yuwono, *Kemimpinan dalam Organisasi Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Yonemata, 1982

dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh yang mengangkat dan Kepala Desa mempunyai status sebagai pemimpin pada masa pengangkatan berlaku, yaitu masa jabatan Kepala Desa enam terhitung mulai sejak tanggal pelantikan.

Adapun mengenai pemimpin non formal tidak diuraikan lebih lanjut karena yang diambil untuk variabel kepemimpinan dalam penelitian ini hanya kepemimpinan Kepala Desa (Pemimpin Formal), sedangkan kepemimpinan non formal tidak diambil dengan alasan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin formal dianggap lebih bisa mempengaruhi pengikutnya dari pada pemimpin non formal. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa sebagai pemimpin formal, selain hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri, Kepala Desa juga memiliki kekuasaan jabatan (memiliki legalitas formal), sedangkan pemimpin non formal tidak memiliki kekuasaan jabatan.

Seperti diuraikan diatas bahwa Kepala Desa adalah pemimpin formal yang diharapkan mampu berperan bagi warga masyarakat desa. Oleh karena itu Kepala Desa sebagai pemimpin formal dalam aktifitasnya mempengaruhi orang lain (warga masyarakat desa) agar warga masyarakat desa melakukan suatu kegiatan atau tidak melakukan kegiatan (sebagai unsur kepemimpinan yang ke dua) dalam rangka mencapai tujuan bersama (sangat kepemimpinan latipah)

diperlukan cara-cara tertentu agar kemampuan Kepala Desa tersebut terwujud dalam suatu aktifitas yang nyata.

Cara yang dapat di gunakan oleh seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa, dalam perannya dalam masyarakat desa, menurut S. Yuwono adalah :

“Dengan jalan melakukan komunikasi, dan kualitas pribadi pemimpin “.²⁶ Kedua cara pemimpin mempengaruhi orang lain dari pendapat S. Yuwono diatas adalah dapat dipakai sebagai alat ukur untuk variabel kepemimpinan Kepala Desa, namun dalam penelitian ini yang dipakai sebagai ukuran untuk variable kepemimpinan Kepala Desa hanya komunikasi saja dengan beberapa alasan sebagai berikut :

Alasan pertama, cara mempengaruhi orang lain dengan komunikasi tersebut sesuai dengan pendapat Tannenbaum yang dikutip oleh S. Yuwono sebagai berikut.

Kita mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi antara pribadi yang terjadi dalam situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan. Tujuan khusus kepemimpinan selalu melibatkan usaha

... dan ...

Dari pendapat diatas jelas bahwa komunikasi merupakan apa yang dapat dipergunakan pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan pengikut untuk mencapai tujuan.

Alasan kedua, Kepala Desa adalah pemimpin formal. Kepala Desa telah dipilih secara langsung oleh warga masyarakatnya sendiri, dan dalam proses pemilihannya seseorang yang ingin menjadi Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 antara lain yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c) Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, UUD 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya.
- d) Berijazah sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat.
- e) Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.
- f) Sehat jasmani dan rohani
- g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.
- h) Berkelakuan baik, jujur, dan adil.

- i) Sedang tidak menjalani pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan tetap.
- j) Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- k) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuasaan tetap.

Dengan demikian secara formal kualitas pribadi Kepala Desa memenuhi syarat sebagai pemimpin untuk tingkat pedesaan. Sehingga kualitas pribadi Kepala Desa dianggap konstan dan tidak perlu diukur lagi. Dari alasan-alasan tersebut di ataslah untuk variabel kepemimpinan Kepala Desa penelitian ini diukur dari komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya yang dimaksud komunikasi menurut *M. Sjam Rhiza* adalah: Komunikasi adalah merupakan suatu proses timbal balik dari penyampaian pesan, ide, gagasan dan gagasan antara peserta komunikasi.²⁸

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa komunikasi adalah sebagai alat penyampaian pesan, ide dan gagasan peserta komunikasi.

Menurut S Yuwono, penyampaian keterangan-keterangan dan ide-ide (komunikasi) yang berasal dari pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya dapat dibedakan menjadi:

²⁸ M. Sjam Rhiza, *Sistem Komunikasi Desa-desa/Social Movement Desa-desa*, 1984

1. Petunjuk

Ialah keterangan-keterangan pemimpin yang menjadi dasar pegangan bagi para anggotanya, yaitu tentang tujuan bersama (tujuan organisasi), bagaimana cara kerja yang lebih baik, dan tentang kegiatan-kegiatan apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Juga memberi jalan yang baik bila para anggota mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan.

2. Keterangan Umum.

Keterangan ini ditunjukkan agar para anggotanya mempunyai gambaran yang sama akan kemungkinan langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil dengan keputusan bersama. Guna mencapai sasaran inilah pemimpin berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya umum, akan tetapi mempunyai efek mempercepat tercapainya tujuan bersama. Bagi Kepala Desa misalnya, memberikan keterangan tentang tujuan pembangunan secara umum kepada masyarakat desa.

3. Perintah

Yaitu keterangan yang secara tegas mengharuskan kepada para anggota (masyarakat) untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya bagi masyarakat desa diharuskan menanam padi bibit tertentu untuk menghilangkan penyakit tanaman padi dan

4. Peran Kepala Desa

Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peran sehingga peran aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Ada beberapa pengertian peranan yang dikemukakan oleh para pakar. Tetapi disini akan ditulis beberapa pengertian peran antara lain :

a. Menurut WJS. Purworatminto

peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)²⁹

b. Sedangkan menurut Astrid. S. Susanto mengemukakan bahwa peranan itu mengandung tiga hal yang penting yaitu :³⁰

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti disini merupakan

²⁹ WJS. Purworatminto "Kamus Umum Bahasa Indonesia" PN Balai Pustaka, Jakarta 1984, hal 735

³⁰ Astrid S. Susanto "Masyarakat Sosiologi dan Perubahan Sosial" Bina Cipta, Jakarta 1982, hal 05

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. peran adalah sesuatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.

3. peran dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

c. Sedangkan menurut Ralph Linton tentang peran masyarakat bahwa peran mencakupi 3 hal utama, yaitu :³¹

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial.

Jadi , dari beberapa teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan rasa

³¹ Soejono Soekarto, *Sociologi Suatu Pengantar*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hal 146

penuh tanggung jawab sesuai atauran yang berlaku deni tercapainya tujuan yang ditentukan.

Kepala Desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tanga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi membela, meningkatkan kesejahteraan pegetahuan serta kehidupan penduduk Desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili Desa sebagai badan hukum. Tetapi didalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam urusan yang penting urusannya ia dapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lain.

Sehingg. melihat kepada pengertian peran dan kepala Desa diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kemajuan dari sebuah desa.

5. Pendidikan Masyarakat

Mengenai pengertian pendidikan ada beberapa pendapat antara lain :

Menurut RSB. Fudyartanta:

“Pendidikan adalah proses yang membawa perubahan kelakuan manusia dalam pengetahuan, cara berfikir, kecakapan dan perasaan atau sikap mental mereka”.³²

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, sebagai berikut:

³²

“Pendidikan adalah usaha untuk membantu subyek memperkembangkan diri memanfaatkan lingkungan dan bertanggung jawab melestarikan norma-norma”.³³

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan yang membawa perubahan manusia baik pengetahuan, cara berfikir maupun kecakapannya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu memanfaatkan lingkungan, yang dilakukan disekolah.

Tujuan pendidikan pada pokoknya ada dua hal, yang *pertama* adalah pengembangan diri seseorang agar lebih mampu memanfaatkan lingkungan secara rasional, dan yang *kedua* adalah usaha untuk melestarikan norma-norma. Norma yang dijadikan pedoman perlu dilestarikan, misalnya rembuk desa, musyawarah, merupakan sesuatu yang mengandung hal yang normatif. Hal ini perlu dilestarikan dan dikembangkan. Jadi fungsi pendidikan dalam sangkut pautnya dengan tujuan adalah melestarikan norma-norma dan mendorong terjadinya perubahan secara terus-menerus untuk hal-hal yang positif dan rasional.

Pendidikan merupakan proses belajar manusia seumur hidup asal manusia tersebut masih mempunyai kemauan. Dan pendidikan dapat diperoleh dibanyak tempat, waktu dan kondisi.

³³ Noeng Muhadjir, op.,cit.

Hal ini sesuai dengan pendapat Noeng Muhadjir :

Aktifitas pendidikan bukanlah sekedar sekolahan, melainkan kegiatan belajar sepanjang hayat. Belajar mempunyai arti yang luas, dan kegiatannya dapat terjadi di banyak tempat, waktu dan kondisi.³⁴

Pendidikan merupakan proses pendidikan sepanjang hayat. Proses tersebut dapat terjadi di lembaga pendidikan maupun non pendidikan: proses dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa, proses pada anak lebih banyak berlangsung secara formal namun pada orang dewasa pada umumnya lebih cenderung banyak terjadi secara informal.

Dari beberapa pendapat diatas maka jelaslah sudah bahwa pendidikan dapat diperoleh di berbagai tempat, waktu, dan di berbagai kondisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam pendidikan dengan bentuk dan sifat yang berbeda-beda.

Menurut Vembriarta, bahwa dewasa ini dikenal dengan adanya klasifikasi pendidikan menjadi:

- a. Pendidikan Informal
- b. Pendidikan Formal.
- c. Pendidikan Non Formal.³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Pendidikan Dasar, Mambata 1970

Untuk lebih jelasnya klasifikasi pendidikan tersebut, akan diuraikan secara satu persatu seperti dibawah ini :

a. Pendidikan Informal

Dalam hal pendidikan non formal, Drs, Supeno memberikan definisi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pendidikan informal ialah proses pendidikan seumur hidup yang sesungguhnya, dimana tiap-tiap individu memperoleh sikap-sikap, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan, pengetahuan, pengalaman hidup sehari-hari dan pengaruh-pengaruh pendidikan dari sumber lingkungannya misalnya dari keluarga, pekerjaan, permainan dan bisa juga melalui pasar dan media massa.³⁶

Sesuai dengan hal itu Noeng Muhadjir berpendapat :

Berpartisipasi dalam kegiatan, membaca surat kabar, dan mendengarkan radio dapat membelajarkan orang. Modus inilah yang disebut dengan pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal didasari dengan program yang bersifat aksidental.

Dari dua pendapat sarjana tersebut diatas, maka pendidikan informal dapat diartikan sebagai : pendidikan yang diperoleh atau didapatkan seseorang

³⁶ Supeno, Pendidikan Non Formal dalam Program Pembangunan dalam Pembangunan Sosial Jurnal

dalam kehidupannya sehari-hari, baik melalui media masa maupun pergaulan yang tidak disertai dengan persyaratan dan berlangsung seumur hidup.

Dengan demikian apabila seseorang banyak melakukan pergaulan maupun membaca atau mendengarkan media massa, maka orang tersebut akan terdidik dengan sendirinya, sehingga pengetahuannya bertambah dan dapat membuka pandangannya menjadi lebih luas.

b. Pendidikan Formal.

Mengenai pendidikan formal, Noeng Muhadjir berpendapat bahwa :

Pendidikan formal adalah pendidikan yang sangat terstruktur mengenai umur, waktu, dan urutan; pendidikan formal memiliki kurikulum, standar akademik, serta sistem ujian yang relatif sangat ketat.

Menurut Drs. Supeno adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang bentuknya telah terstruktur secara hirarkis bertingkat-tingkat secara kronologi dalam sistem pendidikan. Ia berbentuk dalam taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi dan akademik.³⁷

c. Pendidikan Non Formal.

Menurut Fudyartanta, pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Pendidikan non formal adalah pendidikan diluar sistem sekolah, tetapi masih juga menggunakan rencana pendidikan yang pasti (sistematis) tetapi

³⁷ ibid

tidak seluas dan sedalam pendidikan formal. Pendidikan non formal adalah pelengkap dari pendidikan formal (dalam batas-batas tertentu).³⁸

Sehubungan hal diatas Noeng Muhadjir menegaskan:

Dibanding dengan pendidikan formal, pendidikan non formal mempunyai rentangan yang lebih luas mengenai sekopannya, keragaman programnya, tujuannya, metodenya serta keragaman umur peserta.

Di banding dengan pendidikan informal, pendidikan non formal dilaksanakan secara terancang dan dituangkan dalam program.

Dari dua pendapat diatas maka dapat dimengerti bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan diluar sekolah, tetapi masih ada rencana dan program pendidikan yang pasti. Adapun bentuknya dapat bermacam-macam, misalnya kursus-kursus, latihan-latihan dan penataran-penataran, ini semua dapat digolongkan kedalam pendidikan non formal.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan secara menyeluruh, bahwa pendidikan yang meliputi tiga bentuk diatas, adalah dapat menambah pengetahuan, kemampuan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari, dari pada dengan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali.

Oleh karena itu, yang akan diukur untuk variable pendidikan dalam penelitian ini meliputi tiga bentuk pendidikan tersebut, yaitu: pendidikan

1. Cara mendapat data / informasi melalui dan mendapatkan menggunakan

dan pergaulan dengan orang-orang yang lebih pandai dan berpengalaman), pendidikan formal (ijazah terakhir dari pendidikan disekolah-sekolah) dan pendidikan non formal.

6. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa.

Dari awal tulisan ini, telah ditentukan bahwa dalam penelitian ini, hal yang mempengaruhi kualitas masyarakat desa adalah:

a. Peran Kepemimpinan Kepala Desa.

b. Pendidikan Masyarakat

Di bawah ini akan diuraikan hubungan dua variabel tersebut dengan variabel Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa, dengan mengungkapkan berbagai pendapat para sarjana.

Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa adalah suatu bentuk perubahan sosial pada masyarakat desa, dimana ide-ide baru dan secara berencana kedalam masyarakat desa untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih sempurna.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam pembangunan masyarakat desa, ide atau gagasan-gagasan baru diperkenalkan pada masyarakat desa, agar masyarakat desa mengalami perubahan kearah yang lebih maju guna

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Oleh karena itu dalam proses penerimaan ide-ide atau gagasan baru kepada masyarakat desa yang masih tradisional tersebut di perlukan kepemimpinan masyarakat yang diharapkan mampu untuk memberikan penerangan-penerangan, petunjuk-petunjuk dan dapat mengarahkan masyarakat desa lebih tanggap terhadap ide-ide baru tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rustian Kamaluddin:

Sungguhpun demikian untuk suksesnya pembangunan dan tercapainya kemakmuran dalam masyarakat sendiri, maka sikap tradisional itu perlu di ubah dan disesuaikan dengan cara yang lebih tepat dan dalam waktu yang lebih cepat dari pada hanya diserahkan berkembang begitu saja menurut keadaan. Disinilah pentingnya faktor kepemimpinan masyarakat sebagai *agent of modernization*, perluasan komunitas massa, penyuluhan dan pendidikan masarakat.³⁹

Dari pendapat diatas dapat diketahui letak pentingnya peran kepemimpinan utuk merubah sikap masyarakat kearah yang lebih terbuka dan sekaligus demi suksesnya pembangunan.

Selanjutnya, pendapat Muljarto Tjokrowinoto yang juga telah disebutkan dimuka, bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa, untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan

³⁹ Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Solo, Indonesia

sepertual sebagai arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak berwujud materi semata tetapi juga pengetahuan yang sifatnya spiritual.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa : Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa dari pernyataan diatas ternyata pendidikan masyarakat penting sebagai sarana pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka seseorang akan semakin sadar tentang kebutuhan akan pengetahuan dan pengetahuan sebagai kebutuhan mereka, bila masyarakat menyadari tentang keadaanya, bagi orang yang tingkat pendidikanya tinggi maka masyarakat lebih berusaha untuk merubah keadaanya kearah yang lebih baik, dari pada orang atau masyarakat yang tidak berpendidikan. Dengan demikian pendidikan merupakan ujung tombak pembangunan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam tahap ini berusaha menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar idak terjadi kesalahpahaman.

1. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara sadar dan melalui perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut mencakup

pada peningkatan secara komulatif dan terus menerus produk nyata dari masyarakat. Pembaharuan itu bermula dari suatu keadaan yang dianggap kurang baik mengarah kearah pada keadaan yang lebih baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

2. Masyarakat Desa

Suatu kesatuan hidup dari mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem tertentu, yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan yang membawa perubahan manusia baik pengetahuan, cara berfikir maupun kecakapannya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu memafaatkan lingkungan, yang dilakukan sekolah.

4. Kualitas Masyarakat

kualitas masyarakat adalah suatu tolak ukur untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut telah mampu menjadi masyarakat yang memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berkualitas.

G. DEPENISI OPERASIONAL

Maksud dari definisi Operasional adalah agar lebih mempermudah di dalam penelitian, menurut Sofyan Effendi bahwa definisi operasional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.

1. Peran Kepala Desa

Diukur dari:

- Intesitas Kepala Desa memerikan petunjuk-petunjuk tentang ide-ide dan cara kerja baru yang lebih baik.
- Intensitas Kepala Desa memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya umum bidang kesehatan dan bidang ekonomi masyarakat.
- Intensitas Kepala Desa memberikan perintah untuk melaksanakan program-program pembangunan.
- Intensitas Kepala Desa memberikan teguran dan pujian terhadap warganya dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Pendidikan Masyarakat

Diukur dari:

- a. Pendidikan Formal Masyarakat Desa
 - Yang diukur ijazah dan sertifikat ketrampilan yang dimiliki terakhir yang diperoleh dari pendidikan yang ditempuh oleh warga Desa.

- Yang diukur adalah frekuensi mendapatkan; kursus-kursus, latihan-latihan, penataran-penataran. Serta ketrampilan yang diperoleh melalui kunjungan kerja yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

b. Pendidikan informal masyarakat Desa

- Yang diukur adalah frekuensi dalam melakukan dan mendapatkan media masa dan pergaulan dengan orang-orang yang lebih pandai dan berpengalaman.

3. Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa

Diukur dari keberhasilan pembangunan kualitas masyarakat Desa

a. Sikap Inovatif

Yaitu tingkat keterbukaan warga masyarakat Desa dalam menerima ide-ide baru.

b. Motivasi Berkarya

Yaitu tinggi rendahnya motivasi berkarya dari warga masyarakat Desa.

c. Aspirasi

Yaitu tinggi rendahnya aspirasi/cita-cita warga masyarakat Desa.

4. Kualitas Masyarakat Desa Diukur Dari Indikator-indikator :

a. Tingkat Pendidikan serta sarana pendidikan yang tersedia

b. Teknologi yang dimiliki serta dikuasai

- c. Program-program pembangunan baik yang terencana maupun yang telah terlaksana
- d. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup
- e. Memiliki Kondisi kesehatan yang baik, baik itu kondisi fisik ataupun mental

H. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan metode-metode.

Dengan demikian metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang harus ada. Adapun penyusunan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif (Descriptive research). Yang artinya suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan kelompok tertentu yang atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴¹

Penelitian diskriptif biasanya dilakukan tanpa satu hipotesa tertentu yang dirumuskan secara ketat, walaupun menggunakan hipotesa tetapi tidak diuji secara sistematis, namun mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada, dengan menggunakan teknik Wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini hanya dibatasi di desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh nantinya hanya berlaku pada desa dimana penelitian ini dilaksanakan.

3. Unit Analisis

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa, dalam hal ini yaitu masyarakat desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi

4. Teknik Pengumpulan Data

a). Observasi

Metode ini digunakan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti.

b). Wawancara

Yaitu merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, serta yang satu dapat melihat yang lain.

c). Dokumentasi

Yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas juga meliputi monumen, artifak, foto dan lain sebagainya.

5. Sumber Data

a). Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan jalan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak

b). Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi pustaka atau mengumpulkan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan observasi yang dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kuantitatif, yaitu dimana data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan, selanjutnya menganalisa dengan atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada serta untuk memakai makna yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran mengenai laporan tersebut